



**DAMPAK PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO
TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT PETANI DI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 1989-1998**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Disusun Oleh:

Ardhi Setyawan Novandi

3111413019

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

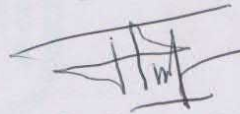
Tanggal : 13 Mei 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
NIP. 19640805 198901 1001



Drs. Jayusman, M.Hum.
NIP. 19630815 198803 1 001

Mengetahui

Kepala Jurusan Sejarah



Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.pd.
NIP. 196406051989011001

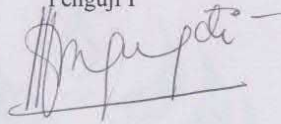
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

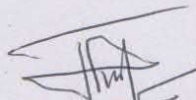
Tanggal : 31 Juli 2019

Penguji I



Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum.
NIP. 19630816 199003 2 002

Penguji II



Drs. Jayusman, M.Hum.
NIP. 19630815 198803 1 001

Penguji III



Prof. Dr. Wasino, M.Hum.
NIP. 19640805 198901 1001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh Solehatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau ditujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 13 Mei 2019



Ardhi Setyawan Novandi
NIM. 3111413019

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Kita tidak bisa menjadi seperti orang lain

Sebelum kita berhasil untuk menjadi diri kita sendiri”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Besar Penulis

PRAKATA

Puji syukur panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kuasa-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Di Kabupaten Grobogan Tahun 1989 - 1998” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial di Universitas Negeri Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat berterima kasih atas bimbingan, kritik, nasehat serta saran yang membangun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan segala kebijakannya.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ijin dalam penelitian untuk penyusunan skripsi.
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.Pd selaku Ketua Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi yang sangat membangun untuk penyelesaian skripsi.
4. Dr. Putri Agus Wijayati, M.Hum sebagai Penguji I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mempresentasikan dan mempertanggung jawabkan hasil penulisan skripsi ini dalam pelaksanaan Sidang Ujian Skripsi.

5. Prof. Dr. Wasino, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus Dosen Pembimbing pertama yang telah memberi saran dan masukan untuk membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
6. Drs. Jayusman, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing kedua yang telah memberi kritik dan saran selama penyusunan skripsi.
7. Seluruh Staff BBWS Pemali – Juana yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pencarian informasi terkait Waduk Kedung Ombo.
8. Dinas PUPR Kabupaten Grobogan bagian “Irigasi” yang telah memberikan informasi mengenai mengenai sistem irigasi di wilayah Kabupaten Grobogan.
9. Kantor BPS Kabupaten Grobogan dimana sebagai penyedia data mengenai pertanian di Kabupaten Grobogan.
10. Perpustakaan Kabupaten Grobogan yang telah menyediakan informasi dan ruang untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh Narasumber yang telah memberikan waktu dan pengalamannya guna melanjutkan penulisan skripsi.
12. Seluruh keluarga yang selalu mendukung secara moral maupun materi.
13. Seluruh teman-teman SOHU 2013.

Semarang, 13 Mei 2019



Ardhi Setyawan Novandi
NIM. 3111413019

SARI

Novandi, Ardhi Setyawan. 2019, *Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Di Kabupaten Grobogan Tahun 1989 - 1998*. Skripsi. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Prof. Dr. Wasino, M.Hum., Drs. Jayusman, M.Hum.

Kata Kunci: Waduk Kedung Ombo, Petani, Grobogan.

Waduk Kedung Ombo merupakan waduk buatan yang dibangun pada tahun 1985-1989 untuk membendung aliran air dari Sungai Serang. Bendungan dari Waduk Kedung Ombo terletak di Desa Rambat Kabupaten Grobogan. Waduk Kedung Ombo berfungsi untuk mengatasi banjir dan kekeringan yang sering melanda wilayah Jawa Tengah. Selain mengatasi masalah banjir dan kekeringan, Waduk Kedung Ombo juga dimanfaatkan sebagai penyedia air baku, pariwisata, perikanan dan PLTA yang mampu memproduksi listrik hingga 22,5 MW. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perkembangan sosial dan ekonomi dari masyarakat petani Kabupaten Grobogan setelah dibangunnya Waduk Kedung Ombo. Sementara manfaat dari penelitian ini adalah guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Waduk Kedung Ombo sebagai penunjang perekonomian masyarakat di wilayah pertanian Kabupaten Grobogan pada tahun 1989-1998.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode sejarah, yang mencakup (1) heuristik, dengan mengumpulkan beberapa sumber dari Badan Arsip Jawa Tengah dan Depo Arsip Suara Merdeka, serta sumber lisan dari DPUPR dan Petani di Kabupaten Grobogan. (2) Kritik sumber, yaitu melakukan uji otentisitas dan kredibilitas. (3) Interpretasi, yakni penafsiran terhadap sumber yang sudah diverifikasi. Dan (4) historiografi dengan penulisan secara kronologis sebagai hasil penelitian sejarah. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data tertulis, arsip, foto dan sumber lisan dari wawancara yang dilakukan dengan saksi sejarah.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Waduk Kedung Ombo yang diresmikan pada tanggal 14 Januari 1989, sempat mengalami penolakan dari warga sekitar dan untuk mengatasi beberapa masalah dalam pembebasan tanah, pemerintah telah memberikan beberapa upaya dan sarana alternatif salah satunya dengan melalui program transmigrasi. Sedangkan manfaat yang di terima oleh para penduduk yang berada di Kabupaten Grobogan yaitu membantu para petani dari kekeringan dan menanggulangi masalah banjir yang selalu datang di setiap musim penghujan. Masyarakat petani yang mulanya hanya bisa menanam 1 kali masa tanam padi dan 2 kali masa tanam palawija dalam satu tahun, sekarang menjadi 2 kali masa tanam padi dan 1 kali masa tanam palawija dalam satu tahun. Dengan adanya pola tanam yang baru, perekonomian masyarakat petani juga mengalami tingkat pendapatan sebesar dua kali lipat dibandingkan dengan penghasilan sebelum adanya Waduk Kedung Ombo.

ABSTRACT

Novandi, Ardhi Setyawan. 2019. *The effect of the Kedung Ombo reservoir construction on the Socio-Economic Life to the Farmers in Grobogan 1989 - 1998.* final project. Departement of history, Faculty of Social Sciece. Semarang State University. Prof. Dr. Wasino, M.Hum., Drs. Jayusman, M.Hum.

Keywords : Kedung Ombo Lake, Farmer, Grobogan.

Kedung Ombo reservoir is an artificial reservoir built in 1985-1989 to stem the flow of water from the Serang River. Kedung Ombo Dam is located in Rambat_Village, Grobogan. Kedung Ombo Reservoir is to overcome the floods and droughts that often hit the Central Java region. In addition to overcoming the problem of floods and droughts, the Kedung Ombo Dam is also used as a provider of raw water, tourism, fisheries and hydropower which is capable of producing electricity up to 22.5 MW. The purpose of this study was to describe how the social and economic development of the farmers in Grobogan after constructing the Kedung Ombo Dam. While the benefits of this study are to increase knowledge and insight into the Kedung Ombo Dam as a support for the economy to the people in the agricultural area of Grobogan in 1989-1998.

The method used in this study is a historical method, which includes (1) heuristics, with collect some resourches from the central java archives, Suara Merdeka archives depot, oral sources from DPUPR and farmers in Grobogan (2) source criticism, that is doing authenticity and kredibility test(3) interpretation, that is iterpretation from the verified souches and (4) historiography with chronological writing as a verified result. The data used in the study are written data, archives, photographs and oral sources from interviews with the expert of history.

The results of this study can be concluded that the Kedung Ombo Reservoir which was inaugurated on 14 June 1989 had rejection from the people around reservoir. To resolve some problems in land acquisition, the government give some effort and alternative way like provide a new land and transmigration program. Whereas the benefit to the people in Grobogan are the reservoir has been able to overcome the problem of flooding and drought every year. At the beginning cause, The farmers who initially could only plant 1 rice planting period and 2 times palawija planting period in one year, now become 2 times the planting period of rice and 1 time the crop planting period in one year. With the new cropping pattern, the farming community's economy has also doubled its income compared to the income before the Kedung Ombo Reservoir.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Ruang Lingkup Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka.....	7
G. Pendekatan.....	13
H. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO.....	17
A. Wilayah Kabupaten Grobogan	17
B. Wilayah Bendungan Waduk Kedung Ombo	19
C. Latar Belakang Pembangunan Waduk Kedung Ombo	32
D. Kondisi Masyarakat di Sekitar Waduk Kedung Ombo	34
E. Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo	37

BAB III POTENSI WILAYAH PENERIMA IRIGASI WADUK	
KEDUNG OMBO.....	43
A. Cakupan Wilayah Irigasi Waduk Kedung Ombo	43
B. Jaringan Irigasi Waduk Kedung Ombo di Kabupaten Grobogan	46
C. Potensi Lahan Pertanian di Wilayah Kabupaten Grobogan	47
D. Pertanian di Kabupaten Grobogan Sebelum Waduk Kedung Ombo.....	51
BAB IV PENGARUH PEMBANGUNAN WADUK	
KEDUNG OMBO TERHADAP MASYARAKAT PETANI	
DI KABUPATEN GROBOGAN	55
A. Penduduk Kabupaten Grobogan	55
B. Pendapatan dan Kebutuhan Petani.....	62
C. Dampak Krisis Ekonomi Tahun 1998 Terhadap Kehidupan Petani di Kabupaten Grobogan	64
BAB V PENUTUP.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Informan dan Transkrip Wawancara.....	71
Lampiran 2.	Peta Wilayah Kabupaten Grobogan.....	87
Lampiran 3.	Gambar Skema Alokasi Air Bendungan Waduk Kedung Ombo.....	88
Lampiran 4.	Gambar Bendungan dan Irigasi Waduk Kedung Ombo.....	89
Lampiran 5.	Informan.....	92
Lampiran 6.	Foto Arsip dan Koran.....	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Pembagian Volume Waduk.....	22
Gambar 2.2	Peta Waduk Kedung Ombo.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nama Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Grobogan.....	18
Tabel 2.2	Data Teknis Bendungan Kedung Ombo	23
Tabel 2.3	Data Teknis Tubuh Bendungan.....	23
Tabel 2.4	Volume Timbunan dan Detail Penimbunan Tubuh Bendungan.....	24
Tabel 2.5	Data Teknis Bangunan Pelimpah Utama.....	25
Tabel 2.6	Data Teknis Bangunan Pelimpah Darurat.....	26
Tabel 2.7	Kapasitas <i>Spillway</i> dan Banjir Rencana.....	26
Tabel 2.8	Data Teknis Terowongan Pengelak.....	28
Tabel 2.9	Data Teknis Bangunan Intake.....	29
Tabel 2.10	Data Teknis Stasiun Pembangkit.....	30
Tabel 2.11	Prosentasi Mata Pencaharian Masyarakat Desa yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo di 4 Kecamatan.....	35
Tabel 2.12	Kemampuan Baca-Tulis Klien LBH Yogyakarta di Kecamatan Kemusu.....	36
Tabel 3.1	Daerah Layanan yang Mendapat Pasokan Air dari Waduk Kedungombo.....	45
Tabel : 3.2	Perkembangan Produksi Sektor Pertanian Kabupaten Grobogan Tahun 1989 – 1993 Dalam Ton.....	50
Tabel : 3.3	Perincian Umum Areal Pertanian (Sawah) Dalam Ha. Kabupaten Grobogan Tahun 1990 – 1994.....	52
Tabel : 4.1	Jumlah Penduduk Dan Perkembangan Pertahun di Kabupaten Grobogan Tahun 1988 – 1998.....	56
Tabel : 4.2	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Grobogan.....	58
Tabel : 4.3	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Mata Pencaharian (Usia 10 Tahun ke Aatas) Yang Bekerja Selama Seminggu Di Kabupaten Grobogan.....	59

Tabel : 4.4	Realisasi Penyaluran KUT Padi dan Palawija Tahun 1998/1999 (MT 1998 dan MT 1999) Kabupaten Grobogan.....	62
Tabel : 4.5	Realisasi Pengembalian KUT Padi dan Palawija Sampai Dengan Tanggal 31 Mei 1999 Kabupaten Grobogan.....	63

DAFTAR ISTILAH

- Bahu : Ukuran petak sawah yang berlaku di kalangan petani, berkisar antara 0,71 - 0,74 hektare.
- Diversifikasi : usaha dalam meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada satu lahan pertanian.
- Ketigo : Musim Kemarau
- Nawang : Melihat
- Transmigrasi : Perpindahan penduduk dari suatu daerah (pulau) yang padat penduduk ke daerah (pulau) lain yang jarang penduduk.
- Spillway : Saluran pelimpah yang digunakan untuk mengalirkan debit air yang berlebih di dalam bendungan.

DAFTAR SINGKATAN

BBWS	: Balai Besar Wilayah Sungai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BT	: Bujur Timur
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DI	: Daerah Irigasi
HA	: Hektare
HAM	: Hak Asasi Manusia
IBDR	: International Bank for Recontruction and Development
IGGI	: Intergovernmental Group on Indonesia
IMF	: International Monetary Found
KK	: Kepala Keluarga
KM	: Kilo Meter
KOLOMPENCAPIR	: Kelompok Pendengar, Pembaca, Pirsawan
KPH	: Kawasan Penguasaan Hutan
KUT	: Kredit Usaha Tani
LS	: Lintang Selatan
MM	: Mili Meter
MW	: Mega Watt
ORBA	: Orde Baru
PEMPROV	: Pemerintah Provinsi
PEMKAB	: Pemerintah Kabupaten
PLTA	: Pembangkit Listrik Tenaga Air
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RP	: Rupiah
SD	: Sekolah Dasar
WB	: World Bank
YAPUSHAM	: Yayasan Pusat Studi Hak Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan sebuah negara. Pembangunan bertujuan guna meningkatkan potensi wilayah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan hasil bumi secara maksimal, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki curah hujan rata-rata 2640mm dalam setahun, namun ternyata air sudah menjadi suatu komoditi ekonomi yang terbatas. Ketersediaan air ternyata tergantung kepada musim hujan, distribusi geografi, kuantitas, kualitas serta banyaknya orang yang membutuhkannya. Di musim hujan air berlebihan menyebabkan banjir yang membawa malapetaka dan menimbulkan banyak korban harta benda bahkan jiwa manusia, namun di musim kemarau keadaan tanah kering kerontang, sering hujan tidak turun sampai berbulan-bulan, sehingga dialami bencana kekeringan yang cukup serius (Pasandaran, 1991:53).

Kondisi tersebut juga melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah terutama bagian utara yang merupakan titik pertemuan dari beberapa sungai yang ada di Jawa Tengah. Beberapa wilayah seperti Kabupaten Pati, Blora, Demak, Kudus, dan Grobogan sering mengalami banjir dan kekeringan. Hal ini terjadi dikarenakan tidak adanya pembaharuan dalam sistem irigasi yang sudah ada.

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan nasional, tujuan utama dan pembangunan pengairan adalah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pembangunan subsektor irigasi untuk menunjang program peningkatan produksi pertanian dengan sasaran utama swasembada beras. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian, sehingga keberhasilan pembangunan akan menjamin meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.

Pembangunan wilayah sungai dapat didefinisikan sebagai pendayagunaan sumberdaya air dan sumberdaya lainnya yang berhubungan pada suatu daerah pengaliran sungai. Irigasi merupakan salah satu dari 15 aspek yang dikenal sebagai aspek-aspek dalam pengembangan wilayah sungai yaitu : pengendalian banjir, irigasi, pembangkit tenaga listrik, navigasi, penyediaan air bersih, air kota dan air industri, pengelolaan daerah aliran sungai, rekreasi, perikanan darat dan perlindungan satwa liar, penanggulangan pencemaran, pengendalian gulma air, drainasi, pengendalian sedimen, pengendalian salinitas, penanggulangan kekeringan, dan pengembangan air tanah (Pasandaran, 1991:47).

Salah satu proyek raksasa yang dikerjakan pada masa Orde Baru adalah pembangunan sebuah waduk baru di aliran Sungai Serang pada tahun 1985 yang kini dikenal dengan sebutan Waduk Kedung Ombo. Waduk tersebut berfungsi untuk mengontrol aliran air di Sungai Serang supaya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi banjir dan kekeringan yang sering melanda wilayah Jawa Tengah. Selain untuk mengatasi banjir dan kekeringan, rencananya waduk ini juga difungsikan sebagai pembangkit listrik tenaga air.

Rencana pembangunan Bendungan Kedung Ombo merupakan bagian dari rencana Proyek Pembangunan Wilayah Sungai Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana) yang akan mencakup tiga karesidenan. Yaitu Karesidenan Semarang, Karesidenan Pati, dan Karesidenan Surakarta, dan Sembilan kabupaten, yaitu Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Jepara, Boyolali, dan Sragen (Stanley, 1994:73).

Menurut Bambang (1998:8) dalam skala besar aktivitas pembangunan akan berdampak luas terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya, bahkan tidak jarang terjadi pada sebuah aktivitas pembangunan tersebut menimbulkan gangguan bagi keseimbangan lingkungan. Maka dari itu, baiknya dalam sebuah pembangunan harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan dan kebijaksanaan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam sebuah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Pembangunan bendungan serta proyek-proyek irigasi serupa selama Orde Baru seringkali mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang tidak bersedia digusur dan dibeli tanahnya secara begitu saja. Selain Kedung Ombo, lima bendungan lain di Jawa yang mendapatkan perlawanan dari warga adalah bendungan Jipang di Jawa Timur, bendungan Gajah Mungkur dan Mrica di Jawa Tengah, serta bendungan Saguling dan Cirata di Jawa Barat. Menurut Rachman (2017:3) “Karakteristik dari sengketa tanah telah berubah. Apa yang terjadi sesungguhnya pada sengketa tanah, bukanlah kelangkaan sumber daya alam saja. Tetapi, terutama adalah suatu ekspansi besar-besaran dari modal, yang difasilitasi oleh hukum dan pemerintah”.

Pada pertengahan tahun 1985 mulai tampak bermunculan berbagai masalah dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo. Masyarakat yang terkena dampak pembangunan mulai melakukan penolakan atas pembebasan tanah yang mereka tempati karena harga ganti rugi tanah yang dianggap terlalu rendah. Selain itu penjelasan dari pihak aparat pemerintah kepada masyarakat Kedung Ombo tidak cukup lengkap sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi tersebut. (Stanley, 1994:82).

Menyimak besarnya peranan sektor pengairan dalam menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya, maka pembangunan pengairan juga akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor-sektor lainnya yang ditunjangnya. Hal tersebut secara tidak langsung juga membuka peluang bagi tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diharapkan kondisi sosial masyarakat akan menjadi lebih baik (Sikel dan Hutapea 1995:2).

Pembangunan Waduk Kedung Ombo akan sangat membantu wilayah lain terutama dalam sektor irigasi. Seperti Kabupaten Grobogan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian akan sangat terbantu dengan adanya Waduk Kedung sehingga mampu menunjang hasil pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah pertanian di Kabupaten Grobogan merupakan sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan hanya mampu menyediakan air untuk satu kali musim tanam padi. Dengan adanya sistem irigasi baru dari Waduk Kedung Ombo diharapkan mampu menyediakan air untuk dapat digunakan dengan sistem pertanian dua kali masa tanam padi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembangunan Waduk Kedung Ombo?
2. Bagaimana kondisi masyarakat dan potensi wilayah yang terdapat di Kabupaten Grobogan?
3. Apa dampak pembangunan Waduk Kedung Ombo bagi perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Grobogan 1989-1998?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui proses dalam pembangunan Waduk Kedung Ombo.
2. Mengetahui bagaimana kondisi masyarakat dan potensi wilayah yang terdapat di Kabupaten Grobogan.
3. Mengetahui dampak yang dihasilkan dari pembangunan Waduk Kedung Ombo bagi perekonomian masyarakat petani di Kabupaten Grobogan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mengetahui hasil dari penelitian mengenai masyarakat petani di sekitar Waduk Kedung Ombo pada tahun 1985-1998, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan tentunya penulis sendiri. Manfaat yang dapat diperoleh sebagai berikut :

1. Secara Akademis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Waduk Kedung Ombo sebagai sarana pembangunan guna menunjang perekonomian negara dan khususnya masyarakat petani.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi mengenai alasan beserta proses pembangunan dan kehidupan sosial di dalam masyarakat sekitar Waduk Kedung Ombo.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi masyarakat setelah pembangunan Waduk Kedung Ombo hingga pada akhir masa Orde Baru.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembabakan waktu maupun tempat, maka dalam penelitian ini perlu adanya pembatasan ruang lingkup kajian yang meliputi lingkup wilayah (*scope spasial*) dan lingkup waktu (*scope temporal*).

1. Unsur Wilayah (*Spatial*)

Unsur Wilayah berkaitan dengan daerah atau tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Tempat yang akan dijadikan objek penelitian adalah Desa Penawangan karena merupakan salah satu wilayah pertanian yang berada tepat di sebelah aliran Sungai Serang Kabupaten Grobogan.

Sedangkan untuk secara luas tempat kajian dari penelitian ini juga akan merujuk ke beberapa wilayah di Kabupaten Grobogan, sehingga diharapkan dapat menemukan sumber atau bukti sejarah yang masih disimpan di dinas setempat.

2. Unsur Waktu (*Temporal*)

Berkaitan dengan waktu yang akan di jadikan pacuan oleh peneliti dimana pengambilan tahun sejak kapan dan sampai kapan peneliti akan memulainya. Penelitian ini mengambil tahun 1989-1998. Pemilihan tahun tersebut berkaitan dengan masa penggenangan waduk hingga terjadinya pergantian pemerintahan dari orde baru menjadi reformasi serta bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ditunjang dengan literatur sebagai acuan untuk dapat mempertanggung jawabkan bahan-bahan kajian dan bahan-bahan perbandingan mengenai objek-objek yang akan di kaji. Sumber yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel, surat kabar.

Buku berjudul “Seputar Kedung Ombo” oleh Stanley. Buku ini menggambarkan alasan beserta proses pembangunan Waduk Kedung Ombo untuk mengembangkan proyek irigasi yang dijalankan pemerintah pada masa Orde Baru.

Dalam buku ini juga dimuat mengenai gambaran secara rinci perubahan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam perkara pembebasan tanah dan pemindahan penduduk. Keadaan masyarakat sekitar sebelum dan sesudah

pembangunan waduk. Mulai dari kebudayaan dan peninggalan para leluhur yang masih dijaga oleh penduduk pada saat itu. Selain proses pembangunan buku ini juga memberikan gambaran mengenai cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun sebuah kawasan dengan program transmigrasi. Program transmigrasi di Indonesia sangat gencar dilakukan pada masa Orde Baru.

Kondisi masyarakat Kedung Ombo ketika terkena dampak dari proyek pembangunan waduk Kedung Ombo dan cara mereka bertahan dari tekanan-tekanan yang di berikan oleh pemerintah untuk segera mengambil uang ganti rugi dan meninggalkan daerah yang akan menjadi wilayah genangan air waduk Kedung Ombo.

Berbagai kalangan dari berbagai lembaga maupun kaum pelajar khususnya mahasiswa serta sejumlah organisasi advokasi professional juga turut serta dalam usaha menjaga dan membantu masyarakat di daerah Kedung Ombo. Para relawan berusaha mendampingi dan membantu dalam memberikan bidang seperti pendidikan dan kebutuhan sandang pangan mereka. Namun dalam pendampingan terhadap masyarakat, para aktivis ini juga mendapatkan ancaman dari aparat pemerintah, karena mengira para aktivis tersebut membujuk para penduduk untuk tetap bertahan dan menolak uang ganti rugi.

Perbedaan buku “Seputar Kedung Ombo” dan penelitian ini adalah dimana buku tersebut menjelaskan mengenai proses pembangunan dan keadaan masyarakat sebelum meninggalkan daerahnya, sedangkan penulis lebih memfokuskan studi kasus pada dampak pembangunan terhadap kehidupan masyarakat petani. Karena pembangunan Waduk Kedung Ombo juga sangat erat

kaitanya dengan pembangunan irigasi guna memenuhi kebutuhan air untuk lahan persawahan milik para petani.

Buku kedua penulis merujuk pada masalah pembangunan irigasi di Indonesia, salah satunya adalah “Irigasi di Indonesia” oleh Effendi Pasandaran. Buku tersebut menguraikan bagaimana permasalahan irigasi sebelum dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah. Suatu sistem irigasi yang tangguh harus mempunyai ketahanan yang tinggi dan juga luwes dalam perkembangan geografis dan budidaya pertanian setempat.

Keperluan irigasi sangat berperan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia khususnya di Jawa memiliki lahan pertanian yang terbilang cukup luas guna menopang sektor pangan di Indonesia. Selain untuk daerah pertanian, irigasi juga membantu menanggulangi bencana banjir di beberapa daerah. Banjir yang terjadi di sebabkan oleh beberapa factor seperti letak geografis dan kurangnya pengelolaan dalam bidang irigasi yang dapat mengakibatkan turunya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian untuk buku ke-tiga penulis menggunakan buku “Petani dan Penguasa (Dinamika Perjalanan Politik Agraria Inodenisa)” oleh Noer Fauzi Rachman. Buku tersebut memberikan informasi yang sangat mendasar dan detail mengenai nasib dan kehidupan petani sejak era kolonial, kemerdekaan, hingga di era Orde Baru. Dengan pengungkapan data dan analisis yang mendalam dan kritis dari penulis, mengantarkan kita untuk mengetahui keterkaitan erat antar kekuasaan politik dari rezim yang berkuasa dengan nasib kehidupan kaum tani.

Pada buku ini mencakup berbagai permasalahan mengenai dinamika kebijakan politik hukum agraria di Indonesia. Bahwa setiap produk perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh politik hukum agrarian dari rezim yang berkuasa. Di era kolonial, politik hukum agraria diberlakukan untuk kepentingan kaum kolonial sehingga memarginalkan dan memiskinkan kaum tani. Setelah Indonesia merdeka, politik hukum agrarian kolonial tersebut digantikan dengan semangat politik agrarian yang mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia, sehingga lahirlah UUPA sebagai produk perundang-undangan agrarian yang anti kolonial dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Pada masa kolonial kebijakan agraria menggunakan politik kapitalis dan para kaum feodal memperoleh harta dan kuasa, sementara para petani dalam keadaan yang sebaliknya. Kemudian peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan terbentuknya politik agraria baru, dimana Orde Baru secara drastis mengarahkan politik agraria kepada politik pembangunan. Perjuangan petani dari berbagai kebijakan dan arah politik penguasa yang dipengaruhi oleh konteks global dan respon lokal. Petani dikorbankan dalam rangka akumulasi modal dari pihak-pihak lain-golongan feodal, penguasa kolonial, elite serta modal asing.

G. Pendekatan

Studi penelitian berkaitan dengan sejarah sosial karena berhubungan dengan masyarakat luas. Untuk memperoleh sumber dan pengolahan data yang akurat, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi. Kegunaan dari ilmu sosiologi dalam bidang ini adalah agar membantu penelitian yang berhubungan dengan masyarakat. Sosiologi akan mengurai mengenai bagaimana hubungan yang

terjalin di kehidupan bermasyarakat dalam suatu kawasan atau daerah tertentu. Keterkaitan antar individu dalam kehidupan bermasyarakat juga menentukan bagaimana perkembangan yang ada di dalam lingkup tersebut.

Pendekatan sosiologis sudah barang tentu akan meneropong segi-segi sosial peristiwa yang dikaji, umpamanya golongan sosial mana yang berperan, serta nilai-nilainya, hubungan dengan golongan lain, konflik berdasarkan kepentingan, ideologi, dan lain sebagainya. Pendekatan antropologi mengungkapkan nilai-nilai, status dan gaya hidup, sistem kepercayaan dan pola hidup, yang mendasari perilaku tokoh sejarah. (Sartono Kartodirdjo, 1992:4).

Penulis melakukan pengamatan mengenai bagai mana kehidupan masyarakat petani yang berada di wilayah Desa Penawangan. Dari hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat petani memiliki pola kehidupan yang hampir sama antara satu individu dan individu lainnya. Mereka hanya bisa mengandalkan hasil dari pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sejarah mempunyai pendekatan yang diakronis, yaitu memanjang dalam waktu namun menyempit dalam ruang. Sedangkan ilmu sosial mempunyai pendekatan sinkronis, yaitu menyempit dalam waktu dan melebar dalam ruang. (Kuntowijoyo, 1995 : 105).

Penelitian ini memakai pendekatan diakronis, dimana memanjang dalam waktu yaitu antara tahun 1989 hingga tahun 1998. Kemudian menyempit dalam ruang dimana bermula dari Kawasan Jratunseluna kemudian dipersempit kembali dikawasan Waduk Kedung Ombo dan areal pertanian di wilayah Kabupaten Grobogan.

Ekonomi Klasik dalam Irawan dan Suparmoko (1982:31), menyebutkan bahwa meningkatnya tingkat keuntungan akan mendorong perkembangan investasi, dan investasi akan menambah volume persediaan capital. Keadaan ini memajukan tingkat teknologi dan memperbesar jumlah uang yang beredar sehingga tingkat upah dapat naik dan selanjutnya kenaikan tingkat upah ini berarti meningkatkan kemakmuran penduduk. Tingkat kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk dan yang terakhir ini menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tahap berikut, berlakunya hukum tersebut berakibat menurunnya tingkat keuntungan dan selanjutnya turunnya tingkat keuntungan menurunkan akumulasi kapital kembali.

Menurut Daniel Thorner dalam Kuntowijoyo (2003:95), seorang antropolog yang menganggap ekonomi petani sebagai sebuah kategori dalam sejarah ekonomi, ialah :

1. Dalam bidang produksi, masyarakat terlibat dalam produksi agraria.
2. Penduduknya harus lebih dari separuhnya terlibat dalam pertanian.
3. Ada kekuasaan negara dan lapisan penguasanya.
4. Ada pemisahan antara desa dengan kota, jadi ada kota-kota dengan latar belakang desa-desa.
5. Satuan produksinya adalah keluarga rumah-tangga petani.

Di lingkungan ekonomi petani, perluasan tenaga kerja keluarga seperti tampak dalam banyak jumlah anak-anak, dianggap sebagai factor yang menguntungkan dan merupakan investasi. Pendekatan terhadap ekonomi petani melalui kalkulasi untung-rugi secara kapitalis tidak akan mampu menjelaskan

perilaku ekonomi petani, sebab tidak ada cara kerja upahan, semua kerja adalah kerja keluarga yang tidak mengenal bayaran (Kuntowijoyo, 2003:96).

H. Metode Penelitian

Menurut Wasino (2018:11) Sebagai ilmu, sejarah memerlukan metode dan metodologi. Metode sejarah atau metode penelitian sejarah dapat di definisikan sebagai suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.

Dari pengertian tersebut, kita dapat menetapkan adanya empat langkah atau tahap kegiatan di dalam metode sejarah, ialah :

1. Tahap pertama adalah heuristik

Pencarian bahan-bahan sumber keterangan atau pencarian bukti-bukti sejarah. (Wasino, 2018:11). Penggunaannya dalam skripsi ini yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber mengenai pembangunan Waduk Kedung Ombo serta dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang diperoleh dari berbagai sumber. Hal ini dilakukan karena jenis penelitian ini adalah menggunakan metode historis, maka jenis sumber data yang digunakan adalah data yang berupa arsip, maupun surat kabar yang sejaman dan sumber-sumber sekunder atau buku-buku referensi sebagai pendukung. Selain itu penulis juga akan terjun langsung di lapangan untuk menggali lebih banyak data dan informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan ini. Sumber data yang digunakan akan di klasifikasi menjadi dua :

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari para saksi yang menyaksikan langsung peristiwa

tersebut dengan mata kepala sendiri. Menurut Gottschalk (1985:35) sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanis seperti diktafon yaitu orang atau alat yang hadir pada peristiwa itu yang diceritakan.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber arsip dan lisan. Sumber arsip berupa daftar transmigrasi Kabupaten Boyolali tanggal 4 April 1989 yang terdapat di Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu penulis juga mengambil beberapa arsip koran tahun 1989 yang berada di Depo Arsip Suara Merdeka.

Kemudian untuk sumber lisan penulis melakukan wawancara dengan bapak Sudarsono yang merupakan Ketua Badan Penyuluh Pertanian (BPP) tahun 1978-2002. Kemudian penulis mewawancarai dua petani yang tinggal di sebelah aliran Sungai Serang yaitu bapak Subadi dan bapak Agus.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang berdasarkan kesaksian dari siapapun yang bukan saksi pandangan mata yaitu seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang diceritakan (Gottschalk, 1985:35). Sumber sekunder bisa diperoleh keterangannya berdasarkan kisah atau pengalaman dari sumber-sumber lainnya.

1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu kegiatan membaca, mencari dan menelaah bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis mendapatkan buku-buku dari Perpustakaan Jurusan Sejarah

Universitas Negeri Semarang, Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah, dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Grobogan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dengan cara berinteraksi langsung dengan narasumber yang mengetahui kejadian peristiwa tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan bapak Giyanto yang merupakan salah satu staf Dinas PUPR Kabupaten Grobogan. Kemudian penulis juga turut mewawancarai bapak Muslih yang merupakan salah satu staf di kantor Kepala Desa Penawangan.

2. Tahap kedua adalah kritik sumber

Kritik sumber adalah penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata. Langkah kedua ini adalah langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai *Kritisme Sejarah* (Wasino, 2018: 12).

3. Tahap ketiga adalah interpretasi atau penafsiran

Yaitu menafsirkan keterangan-keterangan yang saling berhubungan dengan fakta-fakta yang diperoleh. Analisa data merupakan kegiatan pengklarifikasian data yang terkumpul dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian sehingga dapat ditemukan kerangka berfikir yang mendukung hipotesa kajian. Penulisan ini menganalisa dengan teknik analisa kualitatif, teknik setelah data terkumpul, diseleksi mana yang penting dan tidak penting kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan serta dianalisa isinya dengan mencari hubungan sebab akibat dari

sebuah fenomena pada cakupan waktu dan tempat tersebut. Dari analisa ini akan menyajikan dalam bentuk suatu tulisan deskriptif analisis. Suatu analisa tersebut banyak menjelaskan dari hasil pemikiran berdasarkan data-data yang ada (Louis Gottschalk, 1985:144).

4. Tahap keempat adalah Penceritaan

Penyajian yang bersifat formal (resmi) dari penemuan-penemuan dari kegiatan Heuristik dan Kritisme; tahap ketiga ini meliputi penyusunan kumpulan dari data sejarah dan penyajian/penceritaannya (pada umumnya dalam bentuk tertulis) di dalam batas-batas kebenaran yang objektif dan arti atau maknanya; tahap ini disebut *Sinthese* dan Penyajian (*Sinthese* dan Penulisan) (Wasino, 2018:12).

BAB II

PEMBANGUNAN WADUK KEDUNG OMBO

A. Wilayah Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Kabupaten Grobogan memiliki luas wilayah 1.975,864 km² dan Kabupaten Cilacap memiliki luas daerah 2.142,59 km². Letak astronomis wilayah antara 110°15'BT – 111°25'BT dan 7°LS – 7°30'LS, dengan jarak bentang dari utara ke selatan ± 37 km dan dari barat ke timur ± 83 km.

Luas daerah Kabupaten Grobogan adalah 1.975,864 km² dengan batas batas :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Pati.
2. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Ngawi.
3. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Boyolali.
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak.

(Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2002 : 2-3).

Iklim Kabupaten Grobogan adalah iklim tropis, musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Suhu udara minimum 20°C dan maksimum 30°C (Pemerintah Kabupaten Grobogan, 2002 : 9). Jumlah curah hujan selama satu tahun rata-rata 3.497 mm dan jumlah hujan selama satu tahun rata-rata 168 hari (Pemprov Jawa Tengah, 1989, 197).

Secara administratif wilayah Kabupaten Grobogan dibagi menjadi 19 Kecamatan, 273 Desa dan 7 Kelurahan. Berikut adalah tabel nama kecamatan beserta luas wilayah yang berada di Kabupaten Grobogan :

Tabel : 2.1
Nama Kecamatan dan Luas Wilayah
Kabupaten Grobogan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Kedungjati	130,33
2	Karangrayung	140,59
3	Penawangan	74,16
4	Toroh	119,31
5	Geyer	196,19
6	Pulokulon	133,65
7	Kradenan	107,74
8	Gabus	165,38
9	Ngaringan	116,72
10	Wirosari	154,30
11	Tawangharjo	83,60
12	Grobogan	104,56
13	Purwodadi	77,65
14	Brati	54,90
15	Klambu	46,56
16	Godong	86,78
17	Gubug	71,11
18	Tegowanu	51,67
19	Tanggungharjo	60,64
Jumlah		1.975,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan, 2002..

Secara geografis, Kabupaten Grobogan merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur, yaitu Pegunungan Kendeng di bagian selatan dan Pegunungan Kapur Utara di bagian utara. Bagian tengah wilayahnya adalah dataran rendah. Dua sungai yang mengalir adalah Kali Serang dan Kali Lusi.

Dua pegunungan tersebut merupakan hutan jati, mahoni dan campuran yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air hujan dan sebagai lahan pertanian meskipun daya dukung tanah yang rendah. Sedangkan lembah yang membujur

dari barat ke timur merupakan lahan pertanian yang produktif, yang sebagian telah didukung jaringan irigasi. Lembah ini dipadati oleh penduduk karena terdapat banyak aliran sungai, jalan raya dan jalan kereta api.

Panjang jalan di Kabupaten Grobogan adalah 1.010,819 Km, terdiri dari jalan provinsi 137,139 km, jalan kabupaten 173,5 km, dan jalan desa 700 km. Kabupaten Grobogan tidak memiliki jalan negara, sedangkan untuk panjang jalan kereta api 258,783 km dengan stasiun sebanyak 15 buah. Prasarana pengairan yang ada berupa dam/bendung sejumlah 21 buah dengan kemampuan pengoncoran tanah seluas 12.265 Ha dan 43 buah sumber/mata air pedesaan dengan kemampuan pengoncoran tanah seluas 8.803 Ha (Pemprov Jawa Tengah, 1984 : 166).

B. Bendungan Waduk Kedung Ombo

Secara administratif, bendungan Kedung Ombo terletak di Desa Rambat, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Secara geografi Bendungan Kedungombo berada pada koordinat $7^{\circ} 15' 33''$ LS dan $110^{\circ} 50' 18''$ BT. Lokasi Bendungan Kedungombo dapat ditempuh dari Kota Semarang ke arah tenggara sejauh kurang lebih 90 km melalui Jl. Raya Semarang – Purwodadi - Sragen. Di samping itu, lokasi Bendungan Kedungombo juga dapat ditempuh dari Kota Surakarta ke arah utara sejauh kurang lebih 40 km, melalui Jl. Raya Surakarta – Gemolong – Purwodadi (BBWS Pemali-Juwana, 2015:2-1).

Sebelah utara lokasi Waduk Kedung Ombo merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 50-94 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebelah

selatan merupakan dataran tinggi dengan ketinggian antara 94-292 meter di atas permukaan laut. Genangan Waduk Kedung Ombo terletak pada dua aliran Sungai Serang yang mengalir ke arah timur laut dan Sungai Uter yang mengalir dari selatan ke arah utara (Stanley, 1994:42).

Waduk Kedung Ombo membendung arus Sungai Serang yang tepat berada di Desa Rambat dan Desa Kalibancar Kabupaten Grobogan, dengan wilayah yang menyangkut kawasan 22 desa dalam wilayah Kabupaten Boyolali, yaitu Kecamatan Kemusu meliputi 9 desa dan Kabupaten Sragen, yaitu Kecamatan Miri dan Kecamatan Sumber Lawang masing-masing 6 dan 5 desa, serta Kabupaten Grobogan, yaitu Kecamatan Geyer meliputi 2 desa.

Genangan Waduk Kedung Ombo terletak pada dua aliran Sungai Serang yang mengalir ke arah timur laut dan Sungai Uter yang mengalir dari selatan ke arah utara. Dataran tinggi di sekitar genangan terdiri dari beberapa pegunungan kecil. Pegunungan yang terletak di sebelah utara Sungai Serang dimulai dari Gunung Rendeng di Wonoharjo sampai di desa Kemusu merupakan hutan jati dan hutan campuran yang sebagian merupakan wilayah KPH Karangsono. Sedangkan di sebelah selatan aliran Sungai Serang dan sebelah barat aliran Sungai Uter di sekitar Gunung Gedat, termasuk dalam wilayah Karangsono. Di sekitar Gunung Bulakmanyar, sebelah timur Sungai Uter, yang merupakan sambungan dari pegunungan kapur Kendeng, termasuk dalam wilayah KPH Juranggundul (Stanley, 1994:42).

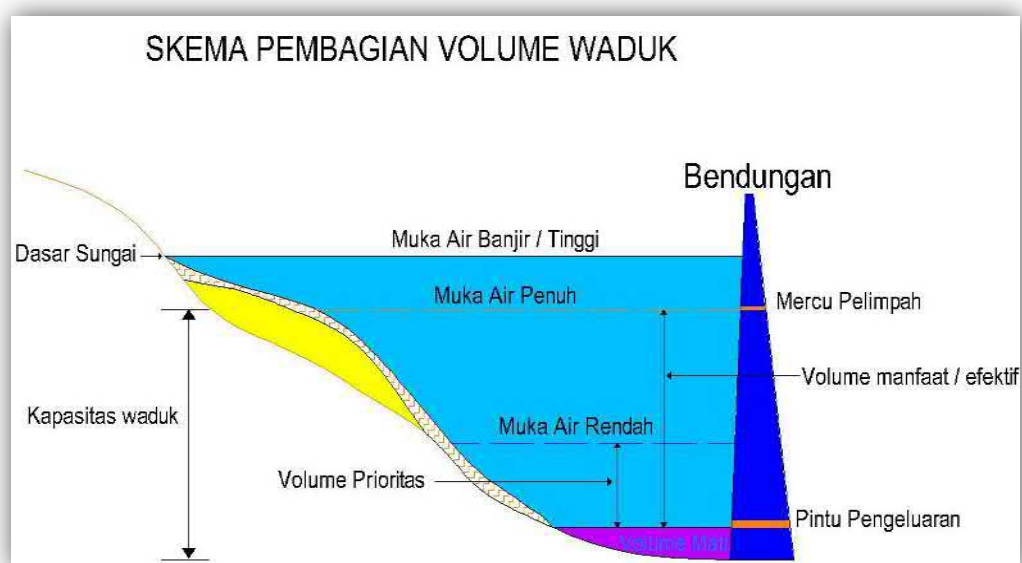
Kali Serang adalah sungai yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang bermuara ke Laut Jawa. Sungai Serang memiliki panjang sekitar

133,17 km mengalir dari barat-utara. Sungai serang berhulu di lereng timurlaut Gunung Merbabu di Wilayah Kabupaten Semarang dan bermuara ke Laut Jawa di wilayah Desa Kedungmalang, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Sementara Sungai Lusi merupakan anak sungai terbesar yang dimiliki Sungai Serang berhulu di Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng yang melewati Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Demak. Wilayah hulu Kali Serang merupakan dataran tinggi dengan kontur curam sedangkan di bagian tengah berupa perbukitan bergelombang.

Diantara lembah-lembah perbukitan di sekitar Waduk Kedung Ombo banyak daerah aliran air hujan yang kemudian membentuk beberapa sungai-sungai kecil. Antara lain Sungai Kapuran, Sungai Klumpit, Sungai Bibis, Sungai Tegalsari, Sungai Genuk, Sungai Dombong dan Sungai Kedungmadu.

Luas genangan Waduk Kedung Ombo bila ketinggian air mencapai elevasi 95,0 adalah 6.125 Ha. Luas tanah ini merupakan areal tanah yang harus di bebaskan. Areal tersebut terdiri dari 1.500 Ha tanah pertanian, 730 Ha sawah, 985 pekarangan, 2655 Ha tegalan, 30 Ha perkebunan dan sisanya merupakan hutan yang meliputi 37 desa di tujuh kecamatan dalam tiga kabupaten. Khusus untuk Kabupaten Boyolali, areal tanah yang terkena proyek Waduk Kedung Ombo seluas 1.503,6792 Ha, meliputi 10 desa di antaranya Wonoharjo, Lemahireng, Watugede, Nglanji, Genengsari, Kemusu, Ngrakum, Sarimulyo, Bawu dan Klewor. Sedangkan untuk Kabupaten Sragen desa yang tergenang antara lain Lorog, Gilirejo, Soko, Boyolayar dan Ngargomulyo (Stanley, 1994:42-43).

Waduk Kedung Ombo mempunyai daya tampung air sebesar 635 juta meter kubik, dengan luas permukaan waduk sekitar 47 km persegi. Ketinggian permukaan air minimal 64,50 meter dan maksimal 90 meter. Ketinggian air normal 73,50 meter. Air waduk akan meluap jika permukaan air mencapai elevasi 95 meter. Listrik yang dapat dihasilkan oleh PLTA Waduk Kedung Ombo sekitar 22,5 MW (Stanley, 1994:43). Waduk yang berdaya tampung 723 meter kubik air tersebut saat kemarau panjang pun, diperhitungkan masih bisa menyisakan 88,4 juta meter kubik air. Sedangkan angka sedimentasi (pengendapan) mencapai 2,8 ton per tahun (Suara Merdeka 15 Januari 1989).



Gambar 2.2 Skema Pembagian Volume Waduk

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

Berikut data teknis beserta penjelasan mengenai Bendungan Waduk Kedung Ombo yang diperoleh dari BBWS Pemali – Juana :

Tabel 2.2
Data Teknis Bendungan Kedung Ombo

Waduk Kedungombo	
Elevasi muka air operasi penuh	EL. 90.0 m
Elevasi muka air minimum	EL. 64.5 m
Volume tampungan total pada FSL	$723 \times 10^6 \text{ m}^3$
Volume tampungan pada FSL	$88.4 \times 10^6 \text{ m}^3$
Volume tampungan aktif	$634.6 \times 10^6 \text{ m}^3$
Luas daerah genangan waduk pada FSL	46.0 km^2
Elevasi muka air banjir maksimum	EL. 95.0 m
Debit <i>inflow</i> tahunan rata-rata	$780 \times 10^6 \text{ m}^2$; ($25.0 \text{ m}^3/\text{dt}$)
Sedimen <i>inflow</i> tahunan	$2.88 \times 10^6 \text{ Ton/tahun}$
Luas daerah pengaliran sungai	614 km^2

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

1. Tubuh Bendungan

Bendungan utama (*main dam*) adalah bendungan urugan tanah dan batu dengan inti (*core*) tegak, lereng hulu dari inti tersebut dilindungi dengan filter transisi dan zona timbunan batu dengan perlindungan rip-rap. Sedangkan lereng hilir dari inti juga dilengkapi dengan filter halus kemudian filter transisi dan timbunan random. Panjang bendungan utama adalah 1600 m dengan lebar mercu 12 m.

Tabel 2.3
Data Teknis Tubuh Bendungan

Tinggi bendungan	61 m
Panjang puncak bendungan	1600 m
Elevasi puncak bendungan	EL 96.0 m
Lebar puncak bendungan	12.0 m
Volume timbunan bendungan	$6.2 \times 10^6 \text{ m}^3$

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

Kemiringan lereng hulu adalah 1:2,5 di timbunan bawah atau sampai dengan elevasi +80,00 dan 1:2 mulai elevasi +80,00 sampai dengan puncak bendungan atau elevasi +96,00. Sedangkan kemiringan lereng hulu bendungan pengelak adalah 1:3. Pada lereng hilir setiap ada seri berm dengan beda ketinggian 10 meter dilengkapi dengan drainase permukaan. Kemiringan lereng 1V:2,5H dan permukaannya dilindungi dengan rumput. Lebar puncak bendungan sebesar 12 meter, sedangkan untukantisipasi penurunan akibat konsolidasi material timbunan dan pondasi, ketinggian bendungan ditambah dengan timbunan *chamber*.

Timbunan pada tubuh Bendungan Kedungombo dibagi menjadi beberapa zona. Masing-masing zona memiliki jenis tanah dan pemadatan yang berbeda. Dalam realisasinya volume timbunan tidak sama dengan volume rencana. Informasi detail penimbunan pada masing-masing zona dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Volume Timbunan dan Detail Penimbunan Tubuh Bendungan

Zona	Volume (m ³)	
	Rencana	Realisasi
Zona 1 (Inti)	1.530.000	1.362.100
Zona 2A (Filter Halus)	190.000	255.000
Zona 2B (Filter Transisi)	570.000	549.200
Zona 2C (Filter Kasar)	112.000	135.200
Zona 3 (Timbunan Batu)	1.100.000	1.189.200
Zona 3A (Riprap)	126.000	118.200
Zona 4 (Timbunan Random)	2.570.000	3.114.000
Jumlah	6.198.000	6.723.200

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

2. Bangunan Pelimpah

Dua bangunan *spillway* dipersiapkan untuk mengalirkan banjir, yang pertama *service spillway* didesain untuk mengalirkan banjir dengan periode ulang 10.000 tahun dan *emergency spillway* untuk mengalirkan debit *inflow* banjir 15 hari PMF pada debit *inflow* puncak (*peak flow*) sebesar 8000 m³/detik.

Service spillway terletak di ujung kanan bendungan utama atau pada bukit tumpuan kanan dengan tipe ogee tanpa pintu dan memiliki lebar 40 meter. Air dari *spillway* ini dialirkan ke *chute channel* yang memiliki lebar 14,5 meter sepanjang 167 meter yang pada ujungnya diakhiri dengan kolam olak. Hilir dari mercu pelimpah berbentuk lonjong dengan *slope* 5.98 % mengecil menjadi 14,5 meter dan 2 buah bangunan (*aeration slots*) dipersiapkan untuk mencegah kavitasi saat kecepatan aliran tinggi. Kapasitas *service spillway* adalah untuk dapat melewati banjir dengan periode ulang 10000 tahun (*inflow* waduk 3200 m³/detik dan *outflow* 500 m³/detik. Sedangkan untuk debit banjir rencana 15 hari PMF *spillway* ini akan mengalirkan debit 1000 m³/detik.

Tabel 2.5
Data Teknis Bangunan Pelimpah Utama

Kapasitas debit pada EL. 94.8	1000 m ³ /dt
Elevasi <i>crest spillway</i>	EL. 90.0 m
Lebar pelimpah	40.0 m
Lebar saluran peluncur minimum	14.5 m
Panjang saluran peluncur	167 m
<i>Level of discharge channel invert</i>	EL. 37.0

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

Pelimpah darurat (*emergency spillway*), terdiri dari 2 bagian masing-masing dengan panjang 150 dan 100 meter dengan elevasi mercu +93,70 m dan +

93,30 m merupakan timbunan (*embankment*) yang terdiri dari inti lempung (*clay core*) dan gravel yang hulunya diperkuat batuan rip-rap di atas lantai beton pada elevasi +90,00 m dengan panjang 250 meter. Bangunan ini akan runtuh apabila terjadi pelimpahan (*overtopping*) dengan ketinggian air (*head*) 30 cm di atas mercu. Pada saat itu akan terjadi kenaikan muka air waduk setinggi 5 meter di atas mercu service *spillway*.

Tabel 2.6
Data Teknis Bangunan Pelimpah Darurat

Tipe saluran terbuka dengan 2 level <i>fuse plug</i> dengan kapasitas	4450 m ³ /dt
Elevasi <i>crest</i>	EL. 90.0 m
Lebar saluran	250 m
<i>Fuse plug washout levels</i> :	
Elemen 1 (lebar 150 m)	EL. 93.3 m
Elemen 2 (lebar 100)	EL. 93.7 m

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989

Detail hubungan antara *inflow* banjir, muka air waduk dan debit air yang melalui *spillway* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7
Kapasitas *Spillway* dan Banjir Rencana

Kala ulang (tahun)	<i>Inflow</i> (m ³ /detik)	Elevasi muka air waduk (SPB)	<i>Outflow</i>		
			<i>Service spillway</i> (m ³ /dt)	<i>Emergency spillway</i> (m ³ /dt)	Debit Total (m ³ /dt)
100					
1000	1.715	+92,10	198	0	193
10000	2.350	+92,70	370	0	370
1 hari	3.250	+93,30	500	0	500
PMF	7.800	+94,20	760	3.480	4.240
15 hari	8.000	+95,00	1000	4.450	5.450
PMF					

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

3. Tampunguan Waduk

Elevasi muka air normal Waduk Kedungombo berada pada + 90,00 m sedangkan elevasi muka air banjir rencana (15 hari PMF) pada + 95,00 m. Menurut pengukuran yang dilakukan pada tahun 2003, kapasitas tampungan total Waduk Kedungombo sebesar 703 juta m³. Kapasitas tersebut turun dari kondisi tahun 1994 sebesar 711 juta m³, yang juga menurun dibandingkan kapasitas awal pada tahun 1989 yaitu sebesar 723 juta m³. Kapasitas tampungan total tersebut dicapai pada saat muka air mencapai elevasi + 90,00 m SPB. Elevasi muka air banjir maksimum dicapai pada elevasi +95,00 SPB dengan kapasitas tampungan banjir mencapai 263 juta m³.

Kapasitas sebesar 636,7 juta m³ air Waduk Kedungombo dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan air di hilir. Pasokan air ke hilir dimungkinkan dengan pelepasan (*release*) melalui *intake* yang berada pada elevasi +55,60 SPB. Elevasi muka air operasi minimum untuk irigasi adalah +67,20 SPB yang melayani 60.905 ha lahan irigasi, sedangkan untuk air baku yang melayani 1.770 l/dt dan PLTA dengan kapasitas 25,07 MW memiliki muka air operasi minimum pada elevasi 64,50 SPB.

Kapasitas tampungan mati Waduk Kedungombo mencapai 66,73 juta m³. Kapasitas tampungan sedimen waduk ini mencapai 10,45 juta m³ sedimen. Sedangkan jumlah air yang masuk ke dalam waduk setiap tahunnya sebesar 780 juta m³ yang berasal dari 614 km² dengan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 2500 mm.

4. Terowongan Pengelak

Bangunan terowongan pengelak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 m, dibuat dengan struktur beton bertulang dengan tebal 50 cm. Terowongan pengelak ini memiliki panjang 325 m dengan kapasitas 180 m³/dt.

Bangunan ini dilengkapi dengan sumbat terowongan (*fuse plug*) yang didesain berlubang. Hal tersebut memungkinkan pembuangan sumbat beton tersebut dengan system peledakan dari jauh (*remote*). Lubang berdinding bahan PVC dibuat di ujung hulu sumbat untuk tempat bahan peledak. Peledakan sumbat beton dilakukan apabila diperlukan yaitu pada saat kondisi darurat.

Tabel 2.8
Data Teknis Terowongan Pengelak

Kapasitas debit pada El 65.0 m	180 m ³ /dt
Diameter terowongan	4 m
Panjang terowongan	325 m
Diameter sementara <i>riparian valve</i>	1.4 m

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

5. Bangunan Intake

Bangunan *intake* Waduk Kedungombo berupa rumah pintu/menara dengan konstruksi beton bertulang dengan tinggi 63,40 m, di dalamnya terdapat peralatan operasional pintu, *stoplog*, *chain block*, *panel control* dan panel listrik. Bangunan pengambilan berupa pintu pengambilan yang dilengkapi *trash rack* sebanyak 4 buah. Pintu ini memiliki dua fungsi sekaligus yaitu untuk irigasi dan pembangkit listrik. Pintu pengambilan berupa pintu sorong dengan dimensi tinggi 3.8 m dan lebar 3,00 m dilengkapi dengan roda yang diletakkan pada alur dan digerakkan

secara hidrolik dan dilengkapi dengan *stoplog* yang dibuat dari plat baja dan dioperasikan dengan *crane*.

Air kemudian melewati pipa pesat konduit baja yang dibungkus beton, dengan diameter 3,8 m dan panjang 270 m. Kecepatan rencana pipa pesat sebesar 10 m/dt dengan debit rencana maksimum sebesar 55 m³/dt pada elevasi + 64,50 m dan 83,5 m³/dt pada elevasi 67,20 m. Pada ujung pipa pesat dilengkapi dengan *outlet* irigasi berupa katup kupu-kupu dengan diameter 2,7 m dan katup kerucut (*cone valve*) dengan diameter 2,1 m. *Outlet* ini memiliki kapasitas maksimum sebesar 55 m³/dt.

Tabel 2.9
Data Teknis Bangunan *Intake*

Tinggi	63.4 m
Lebar	11.5 m
<i>Fixed wheel gate</i>	3.8 m tinggi x 3.0 m lebar
Panjang jembatan hantar	80.6 m
Pipa pesat :	
Diameter dalam	3.8 m
Panjang terowongan	270 m
Kapasitas desain kecepatan aliran maksimum	10 m/dt
Kapasitas desain debit maksimum pada EL. 64.5	55 m ³ /dt
EL. 67.2	83.5 m ³ /dt
Outlet Irigasi :	
Diameter dalam pipa	2.7 m
Diameter katup kupu-kupu	2.7 m
Diameter katup kerucut	2.1 m
Debit desain maksimum	55 m ³ /dt

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

Selain itu, terdapat juga stasiun pembangkit listrik dengan tipe turbin Kaplan. Stasiun ini memiliki debit pembangkitan sebesar 45 m³/dt. *Output* generator sebesar 22,5 MW. Selain itu dilengkapi dengan turbin inlet (*butterfly valve*) dengan diameter 3,8 m.

Tabel 2.10
Data Teknis Stasiun Pembangkit

Jumlah unit pembangkit	1
Tipe turbin	Kaplan
Debit pembangkitan	45 m ³ /dt
<i>Output generator</i>	22.5 MW
<i>Maximum tailwater level</i> kondisi PMF	EL. 49.3
<i>Tailwater level prior to element 1</i>	
<i>Fuse plug being overtopped</i>	EL. 40.5
<i>Minimum tailwater level</i>	EL. 37.0
<i>Assembly bay level</i>	EL. 45.0
<i>Valve floor level</i>	EL. 28.2
<i>Turbin inlet</i>	3.8 m
Kapasitas crane	100 tonnes

Sumber : BBWS Pemali – Juana, 1989.

C. Latar Belakang Pembangunan Waduk Kedung Ombo

Sungai Serang dan Sungai Juana memiliki daerah pengairan seluas 4.743 km persegi. Selama puluhan tahun alirannya dapat terkendalikan oleh pintu air Wilalung yang terletak 15 km di sebelah selatan kota Kudus. Pada setiap musim penghujan, bahaya banjir selalu dielakkan dengan cara membuang sebagian air ke Lembah Juana. Usaha menjinakkan aliran Sungai Serang sesungguhnya telah berlangsung sekitar satu abad, dengan pembuatan tanggul berbantaran lebar sepanjang 2 km. pada sisi kiri sungar, tanggul di bangun antara Penawangan – Karanganyar. Sementara itu, pada sisi kanan dibangun tanggul antara Klambu hingga tepi jalan raya Semarang-Pati (Stanley, 1994:71).

Lembah Juana merupakan daerah buangan banjir dimana sekarang telah menjadi daerah pertanian yang subur. Karena seiring dengan terjadinya perubahan ekonomi dan sosial yang cukup pesat Lembah Juana kini telah beralih fungsi menjadi wilayah pertanian dan pemukiman. Perubahan ini menyebabkan fungsi pintu air Wilalung yang dibangun pada tahun 1918 dengan tujuan sebagai penangkal bahaya banjir di hilir Sungai Serang, sekarang justru mengundang musibah. Kemampuan pembuangan air ke arah kanan menuju Lembah Juana tidak bisa dilakukan lagi, akibat keadaan tanah yang telah meninggi akibat pengaruh sedimentasi. Pada setiap musim penghujan, bahaya banjir selalu muncul mengancam Lembah Juana, dan sebaliknya di musim kemarau daerah ini senantiasa mengalami kekeringan yang dapat digolongkan sebagai bencana.

Gagasan pembangunan Waduk Kedung Ombo tidak lepas dari potensi pertanian daerah Demak, Kudus, Pati dan Grobogan sebagai daerah hilir yang kini

diupayakan kembali sebagai lumbung padinya Jawa Tengah. Untuk meningkatkan system irigasi dimana baru sebagian saja yang memiliki irigasi teknis. Sedadi 36 ribu hektar dan sebagian lagi seluas 23 ribu hektar belum memperoleh irigasi teknis. Kenyataannya daerah tersebut selalu kekurangan air pada musim kemarau dan pada musim penghujan dilanda banjir (Suara Merdeka 15 Januari 1989).

Banjir besar yang terjadi pada awal 1980 telah menenggelamkan wilayah seluas kurang lebih 83.500 ha di Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Grobogan. Banjir di tahun 1981 menenggelamkan wilayah seluas kurang lebih 50.000 ha. Banjir-banjir tersebut juga menyebabkan jalan provinsi mengalami kerusakan berat sepanjang 333 km, jalan kabupaten 43 km, jembatan yang hanyut ada 13 buah. Belum lagi, ditambah dengan jebolnya tanggul, bendungan irigasi dan rusaknya jaringan saluran air teknis di empat lokasi (Stanley, 1994:71-72).

Selain masalah banjir, muncul juga masalah kekurangan air yang dibutuhkan untuk tenaga listrik, air minum, industri dan irigasi. Hal ini muncul karena semakin banyaknya bermunculan perindustrian dan persawahan di sebelah utara Lembah Juana. Areal irigasi yang didapat diairi menyusut menjadi 30% dari kebutuhan. Akibatnya, terjadi lahan surjan yang meliputi areal seluas kurang lebih 13.000 ha di wilayah sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana. Sebuah kawasan yang biasa disingkat menjadi Jratunseluna (Stanley, 1994:72).

Waduk Kedung Ombo merupakan waduk serba guna, pemanfaatannya untuk: irigasi, penyediaan air baku, pembangkit tenaga listrik, perikanan dan pariwisata. Waduk Kedung Ombo memberikan manfaat untuk irigasi pertanian di wilayah Grobogan, Demak, Pati dan Kudus seluas 60.965 ha. Untuk keperluan

irigasi ini dilayani oleh beberapa bendung antara lain Bendung Sidorejo, Sedadi, dan Klambu. Manfaat penyediaan air baku Waduk Kedung Ombo untuk air minum rumah tangga dan industri mencapai 1.770 liter/detik.

Waduk Kedung Ombo juga memproduksi listrik di tiga lokasi, yaitu PLTA Kedungombo 22,5 MW yang berada di kaki bendungan, PLTA Sidorejo 1,4 MW, dan PLTA Klambu sebesar 1,17 MW. Manfaat energi listrik yang dihasilkan dari PLTA Kedungombo tidak secara langsung dapat dirasakan di daerah sekitar waduk, mengingat pendistribusian produk energi listrik dari sini dilakukan secara integral bersama-sama dengan jaringan listrik interkoneksi Jawa-Bali (BBWS Pemali – Juana, 2015:15-16).

Secara keseluruhan, Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna akan membentang di areal seluas kurang lebih 7.900 km persegi di antara deretan gunung, antara lain Ungaran, Merbabu, Telomoyo, Muria dan Pegunungan Kapur Utara. Melalui pembangunan ini, pemerintah Indonesia berniat meningkatkan usaha pengamanan dan pengendalian banjir. Sekaligus melindungi daerah-daerah pertanian, industri dan pemukiman (Stanley, 1994:73).

D. Kondisi Masyarakat di Sekitar Waduk Kedung Ombo

Waduk yang memiliki luas pada permukaan air tinggi 49,50 kilometer persegi tersebut harus mencaplok areal 15 desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Sragen seluas 2.765 hektar (66 persen), 16 desa dari 3 Kecamatan Kabupaten Boyolali seluas 1.319 hektar (32 persen) dan 6 desa dari 2 Kecamatan di Kabupaten Grobogan seluas 79 hektar (2 persen). Luas tersebut masih di tambah tanah negara

504 hektar dan milik perhutani 1.500 hektar, yang total kebutuhannya seluas 6.167 hektar (Suara Merdeka, 15 Januari 1989).

Untuk 6 desa di wilayah Kabupaten Grobogan yang terkena dampak pembangunan Waduk Kedung Ombo di antaranya adalah Satren, Kedung Miri, Gumukrejo, Ngawen, Kedung Ombo, dan sebagian wilayah desa Rambat. Selain difungsikan sebagai wilayah bendungan waduk, sebagian wilayah tersebut akan digunakan juga sebagai perumahan untuk para pekerja BBWS Pemali-Juana.

Penduduk yang berada di wilayah Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo secara keseluruhan berjumlah 5.268 kepala keluarga. Lebih dari separuh di antaranya, yaitu 3.006 KK, berada di wilayah Kecamatan Kemusu, sedangkan di Kecamatan Miri 1.516 KK, Kecamatan Sumber Lawang 619 KK dan Kecamatan Geyer 127 KK. Rata-rata jumlah jiwa dalam setiap keluarga antara 5-6 orang sehingga jumlah orang yang harus meninggalkan tanah kelahirannya ada sekitar 30.000 jiwa. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Baik sebagai petani penggarap, maupun buruh tani. Sedangkan lainnya, bekerja sebagai pencari kayu, tukang batu, tukang kayu, sopir/kenek angkutan, pengrajin barang kerajinan, penggembala, pegawai negeri dan pensiunan (Stanley, 1994:44).

Tabel 2.11
Prosentasi Matapencaharian Masyarakat Desa yang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Kedung Ombo di 4 Kecamatan

Mata pencaharian	Sumberlawang	Miri	Geyer	Kemusu
Petani	36,7%	39,1%	39,9%	37,1%
Buruh tani	24,4%	26,4%	32,8%	24,1%
Lain-lain	38,9%	35,5%	27,3%	38,8%
Jumlah	100%	100%	100%	100%

Sumber: Institute of Ecology Pajajaran University 1984 Dalam Stanley 1994.

Hasil dari pertanian sebagian besar adalah padi, jagung, wijen, kedelai, ketela ubi dan pisang. Khusus untuk Kecamatan Kemusu memiliki daerah yang cukup subur dibandingkan dengan wilayah kecamatan di sekitarnya. Hasil pertanian di wilayah Kemusu sebagian besar adalah kedelai, jagung, pisang dan ketela pohon. Para penduduk biasanya menjual hasil pertanian mereka ke kecamatan lain seperti di Kecamatan Juwangi yang selalu mendapat pasokan ketela pohon dan pisang dari Kecamatan Kemusu.

Tingkat pendidikan formal penduduk Kedung Ombo dapat dikatakan rendah. Sebagian besar penduduk tidak menyekolahkan anak-anak mereka untuk membantu pekerjaan para orang tua. Sebagian lainnya hanya sempat menikmati pendidikan formal sampai tingkat SD atau tidak tamat SD. Banyak masyarakat yang masih buta huruf meskipun telah ada program Kolompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pirsawan) seperti yang ada di daerah Kemusu. Selain program Kolompencapir, juga berjalan program Kelompok Belajar dimana anggotanya sebanyak 582 orang yang tersebar di desa-desa Kecamatan Kemusu. Kemampuan baca tulis yang sangat rendah bisa dilihat dari orang-orang yang menjadi klien LBH seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.12
Kemampuan Baca-Tulis Klien LBH Yogyakarta di Kecamatan Kemusu

Desa	Buta Huruf	Melek Huruf	Tanpa Keterangan	Jumlah
Nglanji	371	126	-	497
Genengsari	320	65	15	400
Klewor	44	23	-	67
Kemusu	70	130	-	200
Bawu	66	38	-	104
Ngrakum	324	58	35	417

Sumber: Laporan LBH di Kecamatan Kemusu 1987 Dalam Stanley 1994.

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Kecamatan Kemusu yang masih buta huruf. Namun pada akhir Oktober 1987 daerah Kemusu sudah dinyatakan sebagai daerah bebas tiga buta, yaitu buta aksara, buta angka, dan bahasa Indonesia (Stanley, 1994:45).

E. Pembebasan Tanah Waduk Kedung Ombo

Bulan November 1988, pihak proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo mengeluarkan pemberitahuan bernomor 1348/UM/KDO/XI/88. Pengumuman itu menghimbau kepada penduduk yang berada di areal genangan dalam batas patok kuning (daerah berbahaya) dan kuning strip merah (daerah bahaya I) agar segera meninggalkan lokasi paling lambat pada akhir bulan November. Alasannya, Waduk Kedung Ombo akan diisi tanggal 12 Januari 1989. Papan-papan besar yang bermuat pemberitahuan tersebut dipasang di setiap jalan yang strategis, setiap pertigaan dan mulut desa (Stanley 1994:133).

Masyarakat di Kabupaten Grobogan yang terkena dampak pembangunan Waduk Kedung Ombo harus meninggalkan tempat tinggalnya dan mengambil uang ganti rugi yang telah disediakan oleh pemerintah. Para warga setempat hanya memiliki dua pilihan yaitu berpindah tempat tinggal ke wilayah terdekat seperti di Desa Rambat yang hanya sebagian saja terkena dampak pembangunan, atau mengikuti program transmigrasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Sebagian masyarakat yang memiliki kerabat di desa terdekat lebih memilih untuk memindahkan rumahnya ke desa tersebut. Namun yang tidak memiliki kerabat lebih memilih mengikuti program transmigrasi dari pemerintah. Dalam

hal ini masyarakat di Kabupaten Grobogan tidak banyak melakukan aksi penolakan.

Berbeda dengan kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Boyolali. Sebagian tokoh masyarakat dan sesepuh desa daerah genangan Waduk Kedung Ombo di wilayah Kabupaten Boyolali yang mulanya enggan mengambil uang ganti rugi pembebasan tanah, namun karena desakan dari aparat kemudian para warga mulai bergegas mengambil uang ganti rugi yang telah dititipkan kepada panitia pembebasan tanah negara di kantor pengadilan negeri setempat.

Tercatat pada 7 Desember 1988 hingga 3 Januari 1989 ada 182 pemilik tanah yang telah mengambil uang ganti rugi. Meskipun jumlah tersebut masih dari sebagian kecil dari 1.835 pemilik tanah masih enggan mengambil uang ganti rugi.

Program transmigrasi dijadikan salah satu strategi untuk mempermudah dalam proses membangun suatu wilayah atau kawasan di masa Orde Baru. Hal ini terjadi karena beberapa tempat yang akan di jadikan lokasi pembangunan, sebelumnya adalah sebuah kawasan yang telah berpenghuni. Masyarakat yang tanah dan bangunan nya terkena dampak dari pembangunan diharuskan meninggalkan tempat tinggalnya atau mengikuti program transmigrasi yang telah disediakan pemerintah sebagai alternatif lain.

Transmigrasi bagi penduduk yang tanahnya tergesur oleh proyek pembangunan seringkali menjadi alternatif yang digunakan pemerintah. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Kedung Ombo. Alternatif bertransmigrasi yang baru ditawarkan pada 1986. Dan sayangnya aparat tidak memberikan perihal seluk beluk bertransmigrasi pada masyarakat di awal-awal

1982 tatkala masyarakat di beritahu tentang rencana pembangunan Waduk Kedung Ombo (Stanley, 1994:97).

Program transmigrasi yang intinya adalah pemindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dari sebuah Negara harus dilepaskan dari beban untuk dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan nasional yang besar seperti membangun Negara. Membebani program pemindahan penduduk yang bersifat spesifik-kontekstual dengan tujuan-tujuan yang kelihatannya mulia dan besar, dari pengalaman selama seabad program ini dilakukan di Indonesia hanya melahirkan praktik kebijakan yang manipulatif dengan agenda tersembunyi yang bersifat jangka pendek dan sulit terhindar dari hipokrisi para pelaksananya (Riwanto, 2010:36).

Banyak kekhawatiran terjadi yang disebabkan oleh program transmigrasi ini. Masyarakat pada masa Orde Baru sebagian besar memiliki profesi sebagai petani dan dengan transmigrasi mereka harus dipaksa untuk menjalani hidup baru tanpa memiliki bekal sedikitpun tentang pengalaman bekerja di bidang lainnya.

Pada 1986 ketika tawaran alternatif transmigrasi dimunculkan, aparat desa dan keamanan menggunakan cara-cara tekanan dan intimidasi kepada masyarakat untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Akhirnya setelah bertahun-tahun masyarakat Kedung Ombo menerima perlakuan tidak menyenangkan dari aparat desa dan keamanan, tawaran bertransmigrasi dianggap sebagai suatu upaya penyelesaian terakhir pemerintah untuk mengusir penduduk dari tanah kelahirannya. Transmigrasi bagi masyarakat tidak lagi dilihat sebagai suatu upaya pemerintah yang dilandasi dengan niat baik (Stanley, 1994:97).

Penduduk yang sama sekali tidak mengetahui perihal program transmigrasi banyak yang dihindangi rasa khawatir bahwa nasib mereka di tanah transmigran akan lebih buruk. Sedangkan sisa yang tidak terkena proyek masih memungkinkan untuk digarap dan menghidupi keluarganya. Sedangkan orang-orang yang berusia lanjut merasa tidak ada mabisi lagi untuk hidup lebih baik lagi seperti yang ada pada mimpi-mimpi yang dijanjikan oleh program transmigrasi. Mereka ingin menghabiskan masa tua mereka dengan menikmati apa yang telah didapatkan selama ini (Stanley, 1994:98).

Tercatat pada salah satu laporan Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Kabupaten Boyolali, pada 31 Maret 1989 telah diberangkatkan 76 KK dengan total 356 jiwa transmigran umum asal daerah Waduk Kedung Ombo. Para transmigran tersebut diberangkatkan melalui Bandara Ady Sumarmo, Solo kemudian langsung menuju daerah proyek Transmigrasi Air Majunto, Kec. Muko-muko Utara, Kab. Bengkulu Utara, Prop. Bengkulu. (Departemen Transmigrasi Kab. Boyolai, April 1989)

Tidak seluruh warga Kedung Ombo bersedia mengikuti program transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah, budaya menggeser rumah ke dataran yang lebih tinggi di lingkungan daerah genangan terus dilakukan penduduk yang bertahan di tanah kelahirannya. Mereka yang berasal dari berbagai desa yang berlainan, banyak berkumpul di bukit-bukit dan membentuk sebuah pemukiman baru (Stanley, 1994:128).

Menurut penulis, tujuan utama dari transmigrasi memiliki berbagai tujuan dan manfaat. Selain meratakan jumlah penduduk dalam suatu negara atau wilayah, hal tersebut juga memiliki fungsi sebagai penekan pada sektor produksi pangan. Diketahui pada masa Orba jumlah penduduk di tanah Jawa sangat meningkat pesat, dengan hal tersebut ditakutkan secara perlahan akan mengikis lahan untuk kebutuhan pertanian. Maka dengan itu pemerintah mengirim para transmigran untuk diupayakan membuka lahan pertanian keluar daerah Jawa.

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut diharapkan transmigrasi akan dapat meningkatkan ketahanan nasional, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya, serta meningkatkan produksi pangan dan komoditas ekspor. Produksi pertanian juga diharapkan mampu mendukung sektor industri sebagai cita-cita pembangunan.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum Ir Radinal Mochtar, warga yang berada di areal genangan sudah di pindah ke daerah yang aman di lokasi pemukiman pengganti yang disediakan pemerintah di Desa Kayen Kecamatan Juwangi, Boyolali. Dalam mempersiapkan lokasi pemukiman pengganti di Desa Kayen tersebut, tim Waduk Kedung Ombo kini sudah menyelesaikan fasilitas umum berupa pasar, Puskesmas, prasarana jalan dan sumur bor sedalam 100 meter lebih guna memenuhi kebutuhan air bersih. Menyusul kemudian, pembangunan masjid dan fasilitas pendidikan (SD). Lokasi baru tersebut ditata apik dan dilengkapi dengan fasilitas yang lebih memadai disbanding kondisi di desa semula. Dengan uang ganti rugi yang mereka terima dari panitia sedikitnya Rp 280/m², harga tanah

di lokasi baru lebih murah, yakni 160 permeter persegi termasuk biaya pensertifikatan tanah (Suara Merdeka 4 Januari 1989).

Keadaan masalah agrarian saat ini, khususnya masalah tanah, sudah tergolong gawat. Sebagai ilustrasi sebuah dokumen pencatatan pelanggaran HAM yang di terbitkan oleh YAPUSHAM dalam edisi terakhirnya (No.10/11/97) mencatat, berdasarkan laporan dari 28 surat kabar yang di kota-kota propinsi seantero Indonesia, sepanjang 27 bulan sejak bulan Juli 1994 hingga September 1996 ada 891 pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa “penyitaan lahan melalui berbagai cara” dan “perampasan lahan melalui berbagai cara”. Suatu jumlah yang sangat besar mengingat bahwa dikemukakan di media massa berdasar kenyataan. Apabila publikasi sengketa tanah di surat kabar diproyeksikan agar memperoleh data sesungguhnya, maka bisa dibayangkan jumlah sengketa tanah yang terjadi. (Noer 2017:1-2).

Proyek waduk yang digariskan menelan 37 desa di tujuh kecamatan tiga kabupaten (Sragen, Boyolali, dan Grobogan) tersebut, tepat pada tanggal 14 Januari 1989 pukul 10.30 siang mulai diisi air dari aliran Sungai Serang dan Sungai Uter. Pengisian yang dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Ir. Radinal Mochtar didampingi Gubernur Jateng HM Ismail dan Pimpinan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Jratunseluna Ir. Soenarno berlangsung cukup sederhana selama satu jam (Suara Merdeka 15 Januari 1989).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tahun 1985 pemerintah melakukan pembangunan Waduk Kedung Ombo guna mengatasi berbagai permasalahan banjir dan kekeringan yang sering melanda wilayah Jawa Tengah. Rencana pembangunan Bendungan Kedung Ombo merupakan salah satu bagian dari rencana pengembangan di sepanjang wilayah Sungai Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana atau yang biasa disingkat menjadi “Jratunseluna”. Jratunseluna sendiri merupakan suatu rangkaian proyek berupa pembuatan waduk-waduk di wilayah Jawa Tengah. Proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo mencakup tiga karisidenan yaitu, Karisidenan Semarang, Karisidenan Pati dan Karisidenan Surakarta. Dari ketiga karisidenan tersebut terdapat 9 kabupaten yaitu, Kabupaten Semarang, Demak, Kudus, Pati, Blora, Grobogan, Jepara, Boyolali dan Sragen.

Tujuan utama dari pembangunan Waduk Kedung Ombo adalah untuk membendung arus Sungai Serang yang berada di kawasan Desa Rambat Kabupaten Grobogan. Waduk Kedung Ombo merupakan waduk serbaguna yang dimanfaatkan untuk irigasi, perikanan, penyedia air bersih dan PLTA. Sedangkan untuk areal genangan Waduk Kedung Ombo diperkirakan mencapai 6.125 ha yang awal mulanya merupakan daerah pemukiman dan pertanian penduduk. Wilayah tersebut mencakup tiga kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Sragen dan Grobogan.

Dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Kedung Ombo mengalami penolakan oleh warga sekitar Waduk Kedung Ombo dalam pembebasan lahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah sebagian besar warga yang terkena dampak dari proyek tersebut tidak bersedia untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka yang sudah turun menurun diwariskan oleh orang tua mereka. Selain itu harga untuk ganti rugi tanah juga tidak sesuai dengan harga tanah yang berlaku saat itu dikarenakan banyaknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh para aparat.

Untuk mengatasi beberapa masalah dalam pembebasan tanah, pemerintah telah memberikan beberapa upaya dan sarana alternatif salah satunya dengan melalui program transmigrasi. Masyarakat juga akan diberikan modal dan lahan untuk bekal memulai kehidupan baru di daerah transmigrasi. Meskipun pada mulanya warga masih belum bersedia mengikuti program tersebut, namun karena dirasa tidak ada pilihan lain akhirnya para warga mulai berangsur mengikuti program tersebut.

Manfaat dari pembangunan Waduk Kedung Ombo dirasakan sendiri oleh para petani di Kabupaten Grobogan. Banyak masyarakat yang sangat bersyukur dengan adanya Waduk Kedung Ombo. Daerah yang mulanya rawan terkena banjir, kini tidak lagi mengalami kebanjiran. Para petani juga sudah bisa menerapkan sistem tanam padi sebanyak dua kali dan palawija satu kali dalam satu tahun. Dengan sistem tersebut hasil pendapatan para petani mengalami kenaikan hingga dua kali lipat sehingga keadaan ekonomi mereka secara perlahan berangsur membaik.

Tahun 1998 bertepatan dengan adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, segala harga untuk kebutuhan pokok di Indonesia secara otomatis juga mengalami kenaikan. Memang pada saat itu harga untuk kebutuhan mengalami kenaikan, namun dengan keadaan ekonomi masyarakat petani di Kabupaten Grobogan yang telah membaik, keadaan tersebut tidak begitu berdampak terlalu besar untuk masyarakat petani di Kabupaten Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambler, John S. 1992. *Irigasi di Indonesia (Dinamika Perkembangan Petani)*. Jakarta. LP3ES.
- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali – Juana. 2015. *Rencana Pengelolaan Bendungan Kedung Ombo*. Semarang.
- Chaniago, Andinof A. 2012. *Gagalnya Pembangunan (Membaca Ulang Keruntuhan Orde Baru)*. Jakarta. LP3ES.
- Emil Salim. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta. LP3ES.
- Fauzi, Noer. 2003. *Bersaksi Untuk Pembaharuan Agraria (Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global)*. Yogyakarta. INSIST Press.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Irawan dan Suparmoko. 1982. *Ekonomi Pembangunan. Edisi III*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Irianto Gatot. 2016. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah. Edisi II*. Yogyakarta. Tiara Wacana Yogya.
- Pasandaran Effendi. 1991. *Irigasi di Indonesia (Strategi dan Pengembangan)*. Jakarta. LP3ES.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah. 1984. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/1985-1988/1989 Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah.
- , 1989. *Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah 1989/1990-1993/1994 Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah*. Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Kabupaten Grobogan. 2002. *Sejarah Kabupaten Grobogan Periode 1988 – 2001*. Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- Rachman, Noer Fauzi. 2017. *Petani dan Penguasa (Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia)*. Yogyakarta. INSISTPress.
- Sanusi, M. 2014. *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*. Jogjakarta . Saufa.
- Siskel dan Hutapea. 1995. *Irigasi di Indonesia (Peran Masyarakat dan Penelitian)*. Jakarta. LP3ES.
- Stanley. 1994. *Seputar Kedung Ombo*. Jakarta. ELSAM.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum, Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung. P.T. Citra Aditya Bakti.
- Tirtosudarmo, Riwanto. 2010. *Mencari Indonesia Jilid II*. Jakarta . LIPI.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. 2018. *Metode Penelitian Sejarah (Dari Riset Hingga Penulisan)*. Yogyakarta. Magnum Pustaka Utama.

Arsip dan Surat Kabar

- Laporan Departemen Transmigrasi Republik Indonesia Kantor Kabupaten Boyolali 31 Maret 1989.
- Suara Merdeka 4 Januari 1989
- Suara Merdeka 5 Januari 1989
- Suara Merdeka 7 Januari 1989
- Suara Merdeka 15 Januari 1989
- Suara Merdeka 15 Maret 1989
- Suara Merdeka 25 Maret 1989
- Suara Merdeka 11 April 1990